



SEKOLAH TETAP DIBERI KELELUASAAN

## Pemkot Tetap Lanjutkan 5 Hari Sekolah

**YOGYA (KR)**- Kendati sudah ada keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang hendak mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 23/2017 terkait kebijakan lima hari sekolah, namun Pemkot Yogya akan tetap melanjutkannya. Surat edaran terkait penerapan lima hari sekolah mulai tahun ajaran 2017/2018 yang sudah disebar ke seluruh sekolah, juga tidak akan dicabut.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya, Edy Heri Suasana, ada beberapa alasan yang mendasari penertapan lima hari sekolah tetap diberlakukan di Kota Yogya. Di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 yang juga mengatur terkait hal tersebut.

Selain itu, Permendikbud 23/2017 sedianya hendak diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur terkait penguatan pendidikan karakter, dan di dalamnya turut memapar-

kan teknis lima hari sekolah. "Sampai sekarang Permendikbud 23/2017 belum dicabut, dan Perpres yang didalamnya mengatur lima hari sekolah, juga belum diterbitkan. Sehingga, edaran yang sudah kami sebar ya tetap saja berjalan," papar Edy, Selasa (20/6).

Selain menyangkut masalah regulasi, alasan lain pemberlakuan lima hari sekolah di Kota Yogya ialah hasil evaluasi di sekolah yang sudah menerapkannya.

Kendati demikian, kebijakan yang hendak diterap-

kan di Kota Yogya ini tidak berniat mengikat. Dinas Pendidikan Kota Yogya tetap memberikan keleluasan bagi masing-masing sekolah untuk menerapkan lima hari sekolah atau enam hari sekolah seperti biasanya.

Terpisah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, soal penundaan lima hari sekolah, pihaknya tidak terlalu mempersoalkan. Karena lima hari sekolah bukan masalah cocok atau tidak, tapi lebih pada mampu atau tidak untuk melaksanakan kebijakan itu.

Untuk itu bagi sekolah yang sudah siap pihaknya mempersilahkan untuk melaksanakan, sementara bagi yang belum tidak perlu memaksakan diri. "Kalau sekolah sudah siap silahkan menerapkan lima hari sekolah, sementara bagi yang belum tidak perlu memaksakan diri," ujarnya.

Sementara Guru Besar Fakultas Hukum UII, Prof. Dr Mahfud MD mengungkapkan, penundaan lima hari sekolah bagus, supaya nantinya bisa menyerap aspirasi seluruh masyarakat dan dituangkan dalam peraturan presiden, tidak sekadar Permendikbud. Sambil memilah sekolah Madrasah Diniyah yang masih efektif dan dibutuhkan karena bagian dari suatu proses pendidikan.

Direktur Pascasarjana Kependidikan UST Ki Prof Supriyoko menambahkan, sebaiknya lima hari sekolah dimulai dari perintisan terlebih dahulu. Misalnya beberapa sekolah yang representatif dijadikan perintisan. Dengan mengambil beberapa sekolah di kota, di pinggiran, di desa, sekolah negeri dan swasta. Sekolah nasional dan berbasis keagamaan non Islam, berbasis agama Islam seperti pesantren.

"Jika diberlakukan sebaiknya dirintis selama setahun dan dievaluasi keukurannya dimana. Dari situ akan ketahuan lima hari sekolah efektif atau tidak," urai Prof Supriyoko kepada *KR* Selasa (20/6).

Sedangkan Yohanes Adhi Satiyoko sebagai orangtua mengaku setuju rencana pemerintah menerapkan lima hari sekolah.

Menurutnya jadi ada satu hari libur bagi siswa untuk berkumpul dengan keluarga. Namun peran keluarga perlu dimaksimalkan kaitannya dengan aktivitas anak agar tidak malah menggunakan waktu libur untuk bermain atau kegiatan yang tidak produktif dan bahkan mungkin negatif.

(Dhi/Ria/M-10/War)-c

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

- Din. Pendidikan  
 ✓ Netral  
 ✓ Segera  
 ✓ utk. diketahui

**Ig. Trihastono, S.Sos, MM**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005